

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI RASNIWATI RASYID
NIM. 10300112085

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rasniwati Rasyid
NIM : 10300112085
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 04 Desember 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Abd. Muthalib Dg. Narang Pao-pao Lr. 2
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual
Komersial Anak (ESKA) ditinjau dari Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 21 Maret 2016
Penyusun,

Andi Rasniwati Rasyid
NIM. 10300112085

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, yang di susun oleh saudari Andi Rasniwati Rasyid NIM : 10300112085, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Maret 2016 M, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI), tanpa (dengan beberapa) perbaikan.

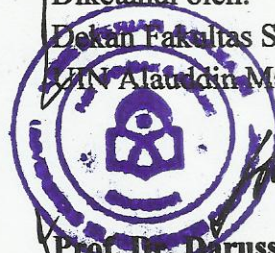
Makassar, 21 Maret 2016 M
12 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M. Si	(.....)
Munaqisy I	: Istiqamah, S. H, M. H	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Abdi Wijaya, S. S, M. Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur dipersembahkan kehadiran Allah swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia sehingga dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya alawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. dan segenap keluarganya, para sahabat, *tabi-tabi'in* sampai kepada orang-orang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman. Semoga teladan Nabi saw. senantiasa menjadi panutan dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia.

Penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya disampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Andi Rasyid dan ibunda Hasni Hasan Saleh atas doa dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik dengan sabar, penuh pengorbanan baik lahiriyah maupun batiniyah sampai saat ini, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka.

2. Saudara-saudaraku tercinta Andi Muh. Hasyim Rasyid dan Andi Hakim Rasyid yang senantiasa memberi warna dalam setiap perjalanan hidup, memberi bantuan, saran, kritik dan teguran yang membangun karakter.
3. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar, serta Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag, Bapak Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M. A, Ibunda Prof. Siti Aisyah, M. A., Ph. D selaku Wakil Rektor I, II dan III yang telah membina dan memimpin UIN Alauddin Makassar yang menjadi tempat untuk memperoleh ilmu baik itu dari segi akademik maupun ekstrakurikuler.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, S. Ag., M. Ag, Bapak Dr. Hamsir, SH, M. Hum, Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum yang membina selama kuliah.
5. Ibunda Dra. Nila Sastrawati, M. Si dan Ibunda Dra. Kurniati, S. Ag., M. Hi selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam atas petunjuk dan arahannya selama penyelesaian kuliah.
6. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag dan Bapak Abdi Wijaya, S. Ag., M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan sejak dari awal hingga selesai.

7. Para dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa mengajar dan mendidik selama menjadi mahasiswa di UIN Alauddin Makassar.

Akhirnya, segala doa dan harapan dikirimkan kepada sang Khalik agar bantuan, saran, kritik, dan yang telah diberikan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samata, 21 Maret 2016

Penyusun,

Andi Rasniwati Rasyid

NIM: 10300112085

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....	19-37
A. Unsur-unsur Eksploitasi Seksual Komersial Anak	19
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak ..	21
C. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Komersial Anak	25
D. Bentuk Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak	33
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	38-52
A. Unsur-unsur Eksploitasi Seksual Komersial Anak	38
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak ..	40
C. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Komersial Anak	45
D. Bentuk Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak	49

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK.....	53-65
A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Hukum Islam.....	53
B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	59
BAB V: PENUTUP	66-67
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fat ah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fat ah dan y '</i>	ai	a dan i
أُو	<i>fat ah dan wau</i>	au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau y '		a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan y '	ī	i dan garis di atas
و	<i>ammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *m ta*

رَمَى : *ram*

قَتَلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *T 'marb ah*

Transliterasi untuk *t 'marb ah* ada dua, yaitu: *t 'marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t 'marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t 'marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t 'marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rau ah al-atf l</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-mad nah al-f ilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al- ikmah</i>

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabban</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjain</i>
الْحَقُّ	: <i>al- aqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasyd d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi .

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Al</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arab</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzhah*)

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-Jal lah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *bill h* دِينُ اللهِ *d null h*

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata Mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Subhanahu wa Ta' la</i>
saw.	= <i>shallall hu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sal m</i>
H	= Hijriyah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.	= Tanpa tempat
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama Penyusun : Andi Rasniwati Rasyid
NIM : 10300112085
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum Islam terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak, 2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak.

Dalam mencapai tujuan tersebut, digunakan penelitian *Library Research* yaitu menelaah literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, mengulas dan menyimpulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (hukum nasional) dan teologi normatif (hukum Islam). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer merupakan al-Qur'an dan Hadis serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan yang terkait. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara identifikasi yaitu mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian dan reduksi data dalam hal ini memilah data yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan analisis komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan menguraikan sumber lainnya setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau diperbandingkan untuk diambil suatu kesimpulan.

Setelah mengadakan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial maka Islam memberikan larangan untuk mendekati maupun mengerjakan perbuatan zina *gairu muhsan* dan siapa saja yang melanggar larangan yang telah ditetapkan Allah maka akan diberikan hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan bentuk perlindungan hukum dalam Pasal 66 dan Pasal 71D. Perlindungan hukum sangat penting agar ada tempat berlindung bagi korban dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial, sehingga anak mendapat perlindungan dari pemerintah sebagai pihak yang menegakkan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang dirugikan.

Dengan memahami tujuan perlindungan hukum maka diharapkan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial dapat memperoleh hak-haknya yang telah dirampas oleh pelaku dalam penerapan perlindungan hukum sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi. Jadi, perlindungan hukum yang dilakukan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaganya, karena pada dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, hak sipil dan kebebasan.¹

Di seluruh dunia, bukan hanya perempuan dewasa tetapi perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak) juga secara terus menerus mengalami perlakuan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Bahkan untuk alasan-alasan yang tidak masuk akal. Untuk itu, Indonesia juga telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Namun kenyataannya, tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di bawah usia 15 tahun, baik pada sektor

¹Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 187.

formal maupun informal. Pada bagian eksploitasi seksual anak, pemerintah mengakui tidak adanya data akurat. Sehingga diperkirakan dari semua kasus eksploitasi seksual sekitar 30 persen dari pekerja seksual di Indonesia yang jumlahnya 30.000-70.000 adalah anak-anak. Mayoritas korbannya adalah perempuan, selain anak laki-laki.² Bahkan, yang memprihatinkan praktik perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan ini bukan hanya terjadi untuk kepentingan bisnis di negeri ini tetapi juga telah merambah ke negara lain seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Hongkong. Pekerja seksual komersial anak yang berasal dari Indonesia dapat menembus pintu imigrasi karena memalsukan paspor sesuai instruksi dari calo yang menjanjikan akan mempekerjakan mereka di restoran, pabrik, atau yang lain.³

Eksploitasi seksual komersial anak sesungguhnya adalah salah satu masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja. Sehingga membutuhkan perhatian serius karena adanya paling tidak ada tiga akibat yang kemungkinan besar akan menimpa anak-anak yang dieksploitasi seksual jika dibiarkan larut dalam sebuah pekerjaan yang sesungguhnya tidak pernah mereka sadari resiko dan bahayanya sebagai berikut:

²Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 86.

³Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 157.

1. Anak yang dieksploitasi itu masih berusia belia dan apalagi tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi-informasi tentang “reproduksi sehat” maka dari sudut psikologis sesungguhnya kematangan seksual mereka belum dewasa. Mereka belum cukup mengetahui resiko yang pasti dari hubungan seksual yang dilakukan secara bebas sehingga kehamilan dini dan penularan PMS (penyakit menular seksual) dengan seluruh implikasinya dengan mudah akan menimpa anak-anak perempuan yang di eksploitasi seksual.
2. Anak yang dieksploitasi seksual karena menjadi korban dan terjerumus dalam dunia prostitusi sering kali harus menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma dari masyarakat atas profesi yang mereka tekuni karena dinilai terkutuk, memalukan, dilecehkan, dan bahkan diisolasi karena dikhawatirkan dapat menyebarkan pengaruh buruk bagi anak-anak perempuan lain di sekitarnya.
3. Dalam berbagai kasus anak yang dieksploitasi terkadang mereka harus mengalami berbagai tindak kekerasan seksual mulai dari rayuan terselubung, penyekapan, penganiyaan dan berbagai bentuk tindak kekerasan lainnya.

Kadaan ini, ditunjang dengan situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai sehingga fenomena yang muncul adalah meningkatnya prostitusi. Keterlibatan anak-anak tersebut, bukanlah berdasarkan motivasi

kesukarelaan melainkan atas dasar paksaan. Menanggapi keadaan tersebut, kelompok pembela perempuan menyerukan dalam berbagai pertemuan Internasional untuk segera menyusun instrument HAM sebagai landasan bagi upaya penegakan, perlindungan dan pemajuan hak asasi anak.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.⁵

Islam juga mengajarkan konsep perlindungan anak. Salah satunya mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak atau secara eksplisit mengandung hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya sehingga Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak tertuang dalam firman Allah QS al-Nisa/4: 9

⁴Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 246.

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 77-78.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta.

Pada ayat yang lain, Allah menganjurkan agar umat-Nya ikut serta berperan dalam melindungi anak, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Tawbah/9: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain...⁷

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah pengeksploitasian seksual pada anak

78. ⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), h.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 198.

yang dituangkan dalam judul Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. *Rumusan Masalah*

Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi batasan obyek pembahasan. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka akan digambarkan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum Islam terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak?

C. *Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan*

Untuk memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami pembahasan ini, maka lebih dahulu diuraikan pengertian judul sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, proses beracara mulai penyidikan hingga pengadilan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial.⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15 menyatakan sebagai berikut:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual.⁹

Dalam hukum Islam memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat di dunia dan akhirat.¹⁰ Perlindungan hukum terhadap anak

⁸Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Institusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam)*, h. 137.

⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 8-9.

¹⁰Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 9.

korban eksploitasi seksual komersial memerlukan perhatian semua pihak. Sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental.

2. Korban

Menurut Moerti Hadiati Soeroso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹¹ Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemberian untuk menyatakan kebaktian dan kesetiaan.¹² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.¹⁴ Dalam rangka memberi rasa keadilan bagi korban, para hakim

¹¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 112.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 595.

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, bab II, Pasal 1.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, bab I, Pasal 1.

seyogyanya mempertimbangkan pemberian ganti kerugian terhadap si korban dalam tuntutananya, karena merupakan suatu hal yang wajar apabila penderitaan atau kepedihan yang menimpa si korban diinginkan dengan diberi kemungkinan mendapat penggantian kerugian.¹⁵

3. Eksploitasi

Menurut Farhana eksploitasi adalah kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa.¹⁶ Eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, secara melawan hukum, transplantasi organ, jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.¹⁷ Eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.¹⁸

¹⁵Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 197.

¹⁶Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24.

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, bab I, Pasal 2.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 290.

4. Seksual

Seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Menurut Musdah Mulia seksual adalah proses sosial yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia.²⁰ Seksual dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual.

5. Komersial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komersial merupakan berhubungan dengan niaga atau perdagangan.²¹ Tindakan komersial terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial, budaya dan yang lainnya untuk mencapai keuntungan.

6. Anak

Menurut Maidin Gultom anak adalah harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1015.

²⁰Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia* Konsep dan Implementasi, h. 285.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 583.

²²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 88.

menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²³ Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pada Pasal 1 ayat (2) secara jelas dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.²⁴ Dalam hukum Islam menyatakan batasan usia seorang anak tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah (*akil baliq*) baik bagi anak pria maupun anak wanita. Sehingga seorang anak yang sudah *akil baliq* jika melakukan suatu perbuatan kejahatan anak dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan dan unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*).²⁵

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak adalah segala upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) ditinjau

²³Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 3.

²⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ,” dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 131.

²⁵Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 43.

dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Abdul Salam Siku, dalam bukunya perlindungan HAM saksi dan korban dalam peradilan pidana, buku ini membahas mengenai perlindungan HAM terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan bahwa kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik itu fisik maupun mental ataupun kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.²⁶ Namun, dalam buku ini belum menjabarkan secara rinci mengapa perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana belum memperoleh haknya seperti jaminan perlindungan atas keamanan saksi dan korban masih diabaikan.

²⁶Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Rabbani Press, 2012), h. 111.

2. Wagiyati Soetodjo, dalam bukunya hukum pidana anak, buku ini membahas konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa dalam perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.²⁷ Buku ini sudah menjelaskan mengenai masalah perlindungan anak tetapi buku ini belum membahas secara rinci mengenai konsep penegakan atau pelaksanaan hukum yang baik untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang menjadi korban.
3. Shanty Dellyana, dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum, buku ini membahas mengenai tindakan eksploitasi seksual komersial pada anak merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan tetapi harus secara bersama-sama dan yang

²⁷Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 62.

penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.²⁸ Dalam buku ini belum membahas secara rinci mengenai kedudukan dan peranan anak.

4. Musdah Mulia, dalam bukunya *Islam hak asasi manusia konsep dan implementasi*, buku ini membahas perlindungan anak mempunyai dampak positif bagi politik luar negeri Indonesia. Namun demikian tetap harus diidentifikasi berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk merencanakan implementasinya dengan sungguh-sungguh dan terprogram.²⁹ Dalam buku ini sudah ada gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia dalam melindungi anak dari tindak kejahatan tetapi belum dibahas secara jelas.
5. Abdussalam, dalam bukunya *hukum perlindungan anak*, buku ini membahas anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan (*crimes againsts humanity*) dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dengan melibatkan

²⁸Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 18.

²⁹Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasinya*, h. 236.

semua pihak dan potensi yang dimilikinya.³⁰ Buku ini sudah ada gambaran mengenai penghapusan eksploitasi seksual anak tetapi belum dibahas secara rinci.

6. Maidin Gultom, dalam bukunya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, buku ini membahas perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, rehabilitasi, memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya.³¹ Buku ini sudah ada gambaran mengenai perlindungan anak tetapi belum dibahas secara rinci mengenai perangkat peraturan apa yang harus digunakan dalam menegakkan perlindungan anak dari tindakan kejahatan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah *Library Research*. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoretis yang diambil dari buku-buku, kitab-kitab, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

³⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 125.

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 70.

2. Pendekatan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Yuridis

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perlindungan hukum bagi korban eksploitasi seksual komersial anak. Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

b. Pendekatan *Syar'i*

Syar'i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data primer dan sekunder.

- a. Data Primer : Al-Qur'an dan Hadis serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
- b. Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam perlindungan hukum

terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) *Identifikasi Data* yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- 2) *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan menguraikan sumber lainnya setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau diperbandingkan untuk diambil suatu kesimpulan. Metode analisis komparatif ini akan digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak.

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum Islam terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak.

- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis sebagai berikut:

- 1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat di pergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan dan penyusunan undang-undang dan buku pengetahuan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial anak.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak dalam memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak guna mewujudkan tujuan hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. *Unsur-unsur Eksploitasi Seksual Komersial Anak Menurut Hukum Islam*

Unsur-unsur yang terdapat dari tindakan eksploitasi seksual komersial pada anak dalam hukum Islam yang dikategorikan ke dalam perbuatan zina karena adanya kesamaan dari segi masalah pelanggaran kesusilaan atau kesopanan, perbuatan keji, serta perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi sebagai berikut:

1. Persetubuhan yang diharamkan.

Untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendirinya. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.¹ Sesuai dengan firman Allah swt. QS al-Isra/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 8.

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*²

Dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa bukan hanya melarang perzinahan tetapi semua hal-hal yang dapat mengundang perzinahan seperti berciuman, berpelukan, saling berpegangan dan lain-lain yang dilihat dari dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

Unsur yang ke dua dari *jarimah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS al-Mukminun/23:5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ((Bandung: Syaamil Quran, 2012), h. 285.

*mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*³

Dalam ayat ini, Allah menerangkan sifat dari orang mukmin yang berbahagia yaitu suka menjaga kemaluannya dari berbagai penyalahgunaan supaya tidak termasuk orang yang tercela dan melampaui batas.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Menurut Hukum Islam

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina. Sehingga syariat Islam melarang karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga.⁴ Konsep syariat ini dimaksudkan untuk mencegah menyebarkan kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.⁵

Agama Islam sangat memperhatikan mengenai pentingnya perlindungan anak sebagaimana dalam QS al-Nisa/4: 9 Allah berfirman:

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 342.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 5.

⁵A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 36.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta. Dalam hadis juga menerangkan bahwa pentingnya perlindungan anak selain itu juga menegaskan ternyata zina merupakan dosa kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah). Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ
أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا أَوْهُوَ خَلَقَكَ، ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ
خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قَالَ ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ أَنْ تُزَا نِي حَلِيلَةً
جَارِكَ.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 78.

Artinya:

Dari Abdullah r.a. katanya: saya bertanya, “ya Rasulullah, dosa manakah yang paling besar?”. Beliau menjawab: “jika engkau mengadakan sekutu bagi Tuhan, padahal ialah yang menciptakan engkau.” Saya berkata, “setelah itu apa?”. Beliau menjawab: “jika engkau membunuh anak sendiri karena takut ia makan bersamamu.” Saya berkata: “setelah itu apa?”. Beliau menjawab: “berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Bukhari).⁷

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial terhadap anak, maka agama Islam sangat memperhatikan hal ini. Sebab malapetaka yang pertama terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh tuntutan biologis. Kasus Habil dan Qabil adalah sebuah contoh konkrit dalam sejarah kemanusiaan. Allah berfirman dalam QS Ali-Imran/3: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ
وَالْحَرثِ ^{قُلْ} ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ط وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَعَادِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah

⁷Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III, dan IV* (Jakarta: Klang Book Centre, 2009), h. 50

*ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (surga).*⁸

Dalam ayat ini, Allah menjadikan kaum wanita sebagai objek puncak dan segala keinginan. Yang demikian itu dikarenakan laki-laki lebih mengutamakan para wanita dalam hati mereka dari pada segala keinginan lain yang ada. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang dikategorikan perbuatan zina dengan menetapkan larangan untuk mendekati dan melakukan zina dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang tidak membedakan seseorang, apakah raja atau hamba sahaya, kaya atau bersahaya, hitam atau putih. Bilamana zina terbukti dilakukan tanpa adanya keraguan, maka hukuman akan ditimpakan kepadanya tanpa memandang kedudukannya dalam kehidupan dunia ini. Contohnya adalah hukum yang dijatuhkan kepada Ubaidullah atau Abi Syamhah, putra kedua Khalifah Umar bin Khattab.⁹ Sehingga Rasulullah saw. menganjurkan untuk memelihara pandangan supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan, melihat *faraj* untuk tidak melakukan perbuatan zina merupakan upaya pencegahan agar setiap orang sebisa mungkin menjauhkan diri dari

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 51.

⁹A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 314.

kejahatan zina.¹⁰ Sehingga Rasulullah saw. menjamin atas keselamatan bagi orang yang dapat menjaga lidah dan kemaluannya. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama masuk surga.

Dengan demikian, Islam menunjukkan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi dalam kaitannya tumbuh kembang dan hidup anak tersebut dari tindakan eksploitasi seksual yang dapat membahayakan anak.

C. Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Komersial Anak Menurut Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ialah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.¹¹

Dalam hukum Islam perbuatan tindak pidana dikenal dengan sebutan *jarimah*. Istilah *jarimah* adalah larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa kepada hukuman yang ditentukan. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan.¹²

¹⁰Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 122-123.

¹¹Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 171.

¹²Hamidah Ayu Ningsih, "Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam", *Skripsi*. Bandung: Fak. Syariah Universitas Islam Bandung, 2004, h. 41.

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau setidaknya oleh al-Qur'an dan al-Hadis.¹³ Atas dasar ini penjatuhan hukuman terbagi atas 3 sebagai berikut:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam, jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perorangan (yang menjadi korban *jarimah*) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah-jarimah hudud* ada 7 yaitu zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minuman keras, mencuri, *hirabah* (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), *murtad* dan pemberontakan (*al-baghyu*).

2. *Jarimah kisas/diat*.

Jarimah kisas maupun *diat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat dan apabila dimaafkan maka

¹³A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h. 12.

hukuman tersebut hapus. *Jarimah kisas/diat* ada 5 yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja), penganiyaan sengaja, dan penganiyaan tidak sengaja.

3. *Jarimah takzir*.

Jarimah takzir adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *takzir*. Pengertian *takzir* adalah memberi pengajaran (*al-ta'dib*), tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah takzir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya.

Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah takzir* serta keadaan si pembuatnya juga. Untuk jenis *takzir* juga tidak ditentukan banyaknya, sedang pada *jarimah hudud* dan *jarimah kisas/diat* sudah ditentukan dan memang *jarimah takzir* tidak mungkin ditentukan jumlahnya. Syara' hanya menentukan sebagian *jarimah-jarimah takzir* yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimah* seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, dan suap.¹⁴

¹⁴Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 7-8.

Tindakan eksploitasi seksual komersial pada anak dalam hukum Islam jika dilihat dari aspeknya maka masuk kategori dalam *jarimah hudud*. Hal ini dikarenakan *jarimah hudud* meliputi perbuatan zina. Kesamaan yang terdapat dari eksploitasi seksual komersial pada anak itu dengan perzinahan dari segi masalah pelanggaran kesusilaan atau kesopanan, perbuatan keji, serta perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS al-Isra/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*¹⁵

Pada permulaan Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan zina adalah dikurung di rumah sampai mati dan dicaci maki. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. QS al-Nisa/4:15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

مِنْكُمْ فَتَأْذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*¹⁶

Dalam ayat ini menerangkan bahwa perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut pendapat muslim dan *Mujahid* yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita).

Eksplorasi seksual komersial pada anak yang masuk kategori perzinahan itu digolongkan ke dalam jenis zina *gairu muhsan*. Perzina *gairu muhsan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.¹⁷ Oleh karena perbuatan ini

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80.

¹⁷M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 4.

termasuk *jarimah hudud* maka sanksi hukuman yang dikenakan itu ada

2 macam sebagai berikut:

1. Dera seratus kali.

Sanksi hukuman dera sebanyak seratus kali didasarkan pada firman Allah swt. QS al-Nur/24: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*¹⁸

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah *akil baligh*, merdeka dan tidak *muhsan* wajib didera seratus kali, sebagai hukuman atas dosa dan maksiat yang telah diperbuatnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggaran hukum itu untuk

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah.

Hukuman dera hendaknya dilaksanakan oleh yang berwajib dan dilakukan di tempat umum, sehingga dapat disaksikan oleh orang-orang banyak dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat pelajaran.¹⁹

2. Pengasingan selama 1 tahun.

Hukuman yang kedua untuk zina *gairu muhsan* adalah pengasingan selama satu tahun. Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah pengasingan itu adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu hukuman pengasingan itu dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi, kelompok Syafi'i membolehkan

¹⁹Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 81.

penahanan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.²⁰

Sanksi terhadap para pelaku zina demikian berat mengingat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri, maupun keluarga dan masyarakat. Di antara dampak negatif sebagai berikut:

1. Penyakit kelamin seperti virus HIV/AIDS, penyakit *gonorrhoea* *siphilis* merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin.
2. Perbuatan zina menjadikan seseorang tidak mau melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat ke tidak inginannya seseorang untuk menikah cukup kompleks baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang.
3. Keharmonisan hubungan suami istri, salah satunya adalah faktor pemenuhan kebutuhan seksual melalui perzinahan, kemesraan hubungan berkurang lantaran salah satu pihak yaitu suami atau istri telah mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya yang bukan suami atau istrinya yang sah.
4. Di negara manapun, terutama negara-negara yang menghormati nilai-nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita yang hamil tanpa ada suami yang sah terutama di Indonesia. Perbuatan zina mempunyai hubungan kuat menjadikan seorang pria atau wanita tidak berketurunan lantaran menolak kehamilan. Data statistik menunjukkan bahwa salah satu penyebab korban kematian bayi adalah akibat dibuat oleh ibunya lantaran ia tidak tahan menderita tekanan moral.²¹

Dengan demikian penjatuhan hukuman *jarimah hudud* atas perbuatan zina itu bersifat umum dan tidak membahas secara khusus terhadap anak akan tetapi memiliki unsur yang sama yakni dari perbuatannya yang termasuk ke dalam tindakan kesusilaan.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 31.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 51-52.

D. Bentuk Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Menurut Hukum Islam

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi seluruh rakyat dari segala bentuk usaha atau perbuatan yang melawan hukum. Salah satu di antaranya ialah dengan cara menegakkan hukum secara adil dan tegas. Upaya seperti ini dimaksudkan agar masyarakat dapat hidup sejahtera, damai, dan teratur.²² Eksploitasi seksual komersial dalam hukum Islam yang dikategorikan dalam tindakan zina itu mutlak harus dicegah.

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan akan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.²³

Sejarah mencatat bahwa usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan zina mulai dari usaha melarang dengan kekerasan dan penyiksaan berupa rajam dengan lemparan batu, di penjara, dicambuk

²²Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 112.

²³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 4.

sampai digunduli. Kejahatan masih terus ada namun, upaya pencegahannya harus tetap ada dan tidak boleh berhenti. Masyarakat pada umumnya hanya melihat bahwa masalah zina, pandangan hanya disudutkan kepada pelaku semata-mata, zina dikutuk, dihina dan sebagainya. Padahal dalam suatu drama perzinahan juga dilakukan oleh langganan laki-laki iseng yang kalau ditanyapun akan mengutuk perzinahan. Di samping itu, sebenarnya si pelaku pribadi adalah korban dari suatu keadaan yang berhubungan dengan berbagai faktor, dan menjadi kambing hitam dalam drama tersebut.²⁴

Kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang dikategorikan dalam perbuatan zina dapat dicegah dan diberikan penanggulangan dengan berusaha mawas diri untuk tidak mendekatkan diri pada hal-hal yang bersangkutan dengan nafsu. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS al-Nur/24: 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

²⁴Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 113.

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنْ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Jarimah takzir Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."²⁵

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

Menurut Quraish Shihab, ayat ini memerintahkan Nabi bahwa hai Rasul katakanlah yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik dilihat seperti di tempat-tempat yang dapat melengahkan tetapi tidak juga menutupnya sekali sehingga merepotkan mereka. Di samping itu, hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal. Selain itu, wanita-wanita hendaknya menjaga kelamin mereka, jangan sampai berzina atau terlihat oleh orang lain.

Janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasan mereka kepada orang lain kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, calak dan sebagainya. Hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka dan jangan memamerkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah, ayah suami, putra-putra suami, saudara-saudara, putra-putra saudara laki-laki dan saudara perempuan, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang mengharapkan sesuap nasi dan belum ada syahwat kepada wanita. Janganlah mereka itu menghentakkan kakinya yang bergelang

untuk memalingkan perhatian orang untuk melihat perhiasan yang semestinya disembunyikan.²⁶

Dengan demikian, upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan menjaga pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan dan memelihara *faraj* untuk tidak melakukan perbuatan zina. Sehingga dapat terwujud ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Dengan kata lain, mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan.²⁷

²⁶Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, h. 119-122.

²⁷Hamzah Hasan, *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 24.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Unsur-unsur Eksploitasi Seksual Komersial Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perbuatan eksploitasi seksual pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melibatkan korban yang masih di bawah umur yang seharusnya dilindungi serta dijauhkan dari kegiatan yang bertentangan dengan hak seorang anak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan unsur-unsur eksploitasi seksual komersial anak yang terdapat dalam Pasal 88 sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Setiap orang dimaksud yakni pelaku yang melakukan atau menempatkan seorang anak dalam situasi darurat yang dapat membahayakan jiwa dan psikologi dari perbuatan tindak pidana sehingga dari perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dia lakukan.

2. Orang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak.

Orang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu mempekerjakan atau menempatkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.

3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Seorang yang mengeksploitasi seksual pada anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan yang dapat membahayakan jiwa, kesehatan, dan psikologi anak.¹

Menurut R. Susilo, unsur-unsur eksploitasi seksual sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan.
2. Adanya suatu perbuatan keji.
3. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi dan lingkungan.²

Dengan demikian, unsur-unsur terhadap eksploitasi seksual pada anak berdasarkan bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 46.

²Hamidah Ayu Ningsih, “Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Bandung: Fak. Syariah Universitas Islam Bandung, 2004), h. 26.

hak anak. Sebagaimana yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia pada September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the ruterne of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and restoration of rights.

Dalam deklarasi tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan

(*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³

Kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada perempuan yang umumnya itu anak terjadi karena perempuan dipandang sebagai objek bukan subjek yang memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya.⁴ Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tindak pidana kejahatan telah diatur ketentuan perlindungan kepada korban sebagaimana

³Farhana, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 161-162.

⁴Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi Perspektif Hukum Nasional, Internasional, dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 28.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Komentar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 115.

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak Pasal 59 berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.⁶

Berdasarkan ketentuan perlindungan terhadap korban dari Pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 ,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 24.

1. Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- (1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (3) Pelibatan berbagai Perusahaan, Serikat Pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁷

2. Pasal 71D

- (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.⁸

Berdasarkan ketentuan perlindungan dan bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban dari tindakan eksploitasi seksual komersial yang selama ini penegakan hukum dan HAM di Indonesia terutama dalam sistem peradilan pidana sering mengabaikan keberadaan saksi dan korban.

Faktanya pelaku tindak pidana selalu menjadi satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan pidana. Pelaku dipahami sebagai pencari keadilan yang berhadapan dengan negara karena telah melakukan pelanggaran terhadap negara. Selain itu, korban justru sama sekali tidak dipandang sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan karena telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku dan berperan

⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 28.

⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 33.

dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan pelaku.⁹ Hal ini disebabkan korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya, belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak aman. Sehingga korban hanya pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan.

Penderitaan yang dialami korban secara fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan orang lain dapat disebabkan murni karena pihak lain atau karena keterlibatan korban didalamnya. Untuk itu, dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak harus menempatkan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum serta selain diberikan restitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71D ayat (1) dan perlu diberikan rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik maupun sosial akibat tindak pidana eksploitasi seksual komersial.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan

⁹Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Rabbani Press, 2012), h. 11.

posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.¹⁰

C. *Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Komersial Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

Setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak baik kekerasan, eksploitasi, penelantaran maupun perlakuan salah lainnya tentu diancam dengan sanksi, baik pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹¹

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain, ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.¹² Penerapan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana kejahatan tergantung pada macam-macam kejahatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi hukum terhadap tindak eksploitasi seksual komersial pada anak yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

¹¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h. 52.

¹²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 81.

Pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak akan dikenakan sanksi hukum pada Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹³

2. Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau

¹³Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002," dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 106.

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi hukum tidak hanya kepada pelaku kejahatan seksual melainkan akan dikenakan juga sanksi hukum terhadap orang yang mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri (orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak) yang tercantum dalam Pasal 88 berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁵ Ketentuan Pasal 88 ini secara tegas menyatakan bahwa penjatuhan hukuman sanksi terhadap orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari tindakan eksploitasi yang dilakukannya yang secara langsung menempatkan atau turut serta melakukan kejahatan eksploitasi seksual. Baik itu ekonomi dan/atau seksual terhadap anak secara langsung.

Selain itu, jika yang melakukan tindakan eksploitasi dilakukan oleh korporasi maka akan dikenakan sanksi hukum pada Pasal 90 yang berbunyi:

¹⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 44-45.

¹⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 46.

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹⁶

KUHP juga memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal berikut:

1. Pasal 287

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

2. Pasal 288

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana paling lama empat bulan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁷

Dengan demikian, sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak dan mucikari hanya sebatas hukuman pidana pokok seperti hukuman pidana penjara dan denda.

¹⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 111.

¹⁷Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 175.

D. Bentuk Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “ kebijakan kriminal (*criminal policy*)”. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁸

Berkaitan mengenai penanggulangan kejahatan terhadap eksploitasi seksual komersial pada anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal sebagai berikut:

1. Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 77.

¹⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 37.

2. Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.²⁰

Selain itu, menanggulangi terjadinya delik Menurut G.B.

Hoefnagels dapat ditempuh 3 upaya sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai delik dan pemidanaan melalui media massa.

Mengacu kepada ketiga upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan tersebut, maka penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis yaitu:

1. Jalur Non Penal (Preventif)

Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal dipandang sebagai tindakan yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka pencegahan kejahatan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Darmawan bahwa batasan-batasan pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup suatu kejahatan melalui

²⁰Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002," dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 37-38.

pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Mengingat bahwa kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka secara kriminologi upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menghilangkan kesempatan. Ini berarti bahwa pencegahan kejahatan harus didahulukan secara terpadu antara aparat keamanan dan masyarakat.

2. Jalur Penal (Represif)

Penanggulangan kejahatan dengan jalur penal (penerapan sanksi pidana) merupakan cara-cara yang digunakan sejak dahulu dalam rangka menekan terjadinya kejahatan. Pada saat orang itu berpikir bahwa dengan menetapkan sanksi pidana yang bersifat menakut-nakuti sekaligus mengandung unsur pembalasan, maka kejahatan akan berkurang. Namun, menurut Sutherland bahwa sekalipun hingga kini masih nampak usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi pidana, tetapi cara-cara politik kriminal (cara menanggulangi dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan dan pergaulan tradisional atau kekeluargaan yang bernilai).

Pemidanaan dalam upaya penanggulangan kejahatan sampai saat ini ketentuan pidana senantiasa diikuti dengan ancaman pidana.

Dimana, pembedaan itu ditujukan kepada pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya, juga dimaksudkan dalam rangka penegakan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari substansi suatu ketentuan pidana.²¹

²¹Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 146-148.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Hukum Islam

Setiap tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sangat dilarang baik itu dari hukum nasional maupun hukum Islam itu sendiri. Begitu juga dengan tindakan kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang sangat dilarang. Hukum Islam memandang kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak dalam kejahatan zina *gairu muhsan* karena adanya kesamaan dari segi masalah pelanggaran kesusilaan atau kesopanan, perbuatan keji, serta perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi. pezina *gairu muhsan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda

serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.¹ Sehingga sangat dilarang untuk didekati apalagi untuk dilakukan sebagaimana dalam firman Allah dalam QS al-Isra/17: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*²

Dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa bukan hanya melarang perzinahan tetapi semua hal-hal yang dapat mengundang perzinahan seperti berciuman, berpelukan, saling berpegangan dan lain-lain yang dilihat dari dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu apabila dilakukan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Rasulullah saw. menjamin atas keselamatan bagi orang yang dapat menjaga lidah dan kemaluannya. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama yang akan masuk ke dalam surga.

Tindakan eksploitasi seksual komersial terhadap anak bukan hanya bersangkutan mengenai kesusilaan atau kesopanan, perbuatan keji, serta perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi tetapi juga telah merenggut hak-hak anak yang telah dilindungi yang seharusnya seorang anak itu

¹A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 308.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), h. 285.

memperoleh perlakuan yang baik, jaminan, dan perlindungan kesehatan baik itu dari keluarga maupun pemerintah selaku penyelenggara negara. Hal ini sesuai dalam QS al-Nisa /4: 9 Allah berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³

Dalam ayat ini menggambarkan bahwa menjaga anak itu adalah amanah dari Allah maka hendaklah para orang tua meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan agar anak di kemudian hari (setelah ditinggal mati orang tuanya) tidak menjadi pengangguran dan peminta-minta.

Dalam hadis juga menerangkan bahwa pentingnya perlindungan anak selain itu juga menegaskan ternyata zina merupakan dosa kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah). Nabi saw. bersabda:

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ
 أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا أَوْهُوَ خَلَقَكَ، ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ
 خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، قَالَ ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ أَنْ تُزَا نِي حَلِيلَةَ
 جَارِكَ.

Artinya:

Dari Abdullah r.a. katanya: saya bertanya, “ya Rasulullah, dosa manakah yang paling besar?”. Beliau menjawab: “jika engkau mengadakan sekutu bagi Tuhan, padahal ialah yang menciptakan engkau.” Saya berkata, “setelah itu apa?”. Beliau menjawab: “jika engkau membunuh anak sendiri karena takut ia makan bersamamu.” Saya berkata: “ setelah itu apa?”. Beliau menjawab: “ berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Bukhari).⁴

Dengan kata lain, dalam hukum Islam memiliki kelebihan dimana Islam memandang bahwa sangatlah penting perlindungan anak karena Islam sangat membenci perbuatan zina sehingga perbuatan tersebut dilarang untuk mendekati maupun melakukan dan akan dikenakan hukuman yang berat sebagai bentuk balasan dari tindakan yang telah dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. ⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yang tidak membedakan seseorang, apakah raja atau hamba sahaya, kaya atau bersahaya, hitam atau putih.

⁴Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III, dan IV* (Jakarta: Klang Book Centre, 2009), h. 50

⁵A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, h. 309.

Bilamana zina terbukti dilakukan tanpa adanya keraguan, maka hukuman akan diberikan kepadanya tanpa memandang kedudukannya dalam kehidupan dunia ini. Contohnya adalah hukum yang dijatuhkan kepada Ubaidullah atau Abi Syamah, putra kedua Khalifah Umar bin Khattab.⁶ Hukuman yang dijatuhkan kepada Ubaidullah atau Abi Syamah, putra kedua Khalifah Umar bin Khattab berdasarkan QS al-Nur/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁷

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah *akil baligh*, merdeka dan tidak *muhsan* wajib didera seratus kali, sebagai hukuman atas dosa dan maksiat yang telah diperbuatnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan

⁶A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 314.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

hari kiamat tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggaran hukum itu untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah.

Ketika wahyu ini turun, dipahami bahwa mereka yang harus dihukum seratus kali dera. Lalu Nabi saw. menjelaskan perintah tersebut dengan sabdanya:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ مِائَةً وَتَغْرِيْبَ عَامٍ .

Artinya:

*Dari Zaid bin Khalid Al Juhani r.a katanya: Saya mendengar Nabi saw. menyuruh supaya orang berzina dan belum kawin, dipukul seratus kali dan pembuangan (penjara) satu tahun.*⁸

Islam menganggap bahwa perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Namun, hukum Islam tidak memiliki kekurangan karena hukum Islam itu bersifat sempurna dan universal. Dimana, hukum yang terdapat dalam hukum Islam itu berlaku sepanjang masa. Hal ini dapat dilihat, hukum Islam itu mengatur dan menegakkan aturan-aturan tingkah laku mengenai kehidupan beragama, keluarga, sosial dan politik. Ini menimbulkan hukum tentang kewajiban-kewajiban moral yang mengikat individu dan orang-orang yang tidak mentaatinya akan

⁸Al-Imam Al-Bukhary, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III, dan IV*, h. 101.

merugikan masa depannya. Oleh karena itu, dengan adanya larangan dan hukuman yang akan diberikan maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Dengan kata lain, mengambil maslahat serta sekaligus mencegah kerusakan.

B. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Eksploitasi seksual komersial anak sesungguhnya adalah salah satu masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja. Berkaitan mengenai hal tersebut maka perlunya perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kejahatan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.⁹ Berdasarkan hal tersebut maka negara termasuk pula segala perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰ Hal ini dimaksudkan sebagai aspek penting dalam penegakan hukum yang dimaksud untuk memberikan

⁹Jimly Asshiddiqie, *Komentar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

¹⁰Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana* (Jakarta: Rabbani Press, 2012), h. 2.

perlindungan dasar, selain itu juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur ketentuan perlindungan hukum pada Pasal 59 berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak penyandang disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.¹¹

Berdasarkan ketentuan perlindungan korban dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial bagi anak maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

¹¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 ,” dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 24-25.

1. Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- (1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (3) Pelibatan berbagai Perusahaan, Serikat Pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.¹²

2. Pasal 71D

- (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.¹³

Pada dasarnya, walaupun korban dari tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak telah diatur ketentuan dan bentuk perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan tetapi dari pihak korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Sehingga akibat yang timbul yakni setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak dipedulikan. Contohnya adalah Hendri Amir Dwipraja berumur 41 tahun yang dengan tega melacurkan istrinya. Akibat perbuatan tersebut istrinya melarikan diri ke Jakarta. Semenjak Hendri ditinggalkan oleh istrinya, dia hanya tinggal bersama 2 anaknya di Jl. Kedung

¹²Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002," dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 28.

¹³Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002," dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 33.

Anyar II. Hendri yang merupakan seorang pengangguran kemudian menjual anak bungsunya yang masih berusia 1 tahun kepada pasangan suami istri asal Kalimantan pada tahun 2007 yang mau mengadopsi dan mendapatkan uang Rp. 7.500.000,00. Selain itu, Hendri juga melacurkan anak sulungnya bernama SA yang berumur 12 tahun pada bulan Maret di temannya yaitu Suhariyadi, Benny dan Trio dengan tarif Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,00. SA juga sering mendapatkan penyiksaan apabila SA menolak untuk menuruti pekerjaan kotor yang dipaksakan bapaknya. Kejadian eksploitasi seksual komersial terhadap SA terungkap ketika SA kabur dari rumah dan meminta perlindungan kepada tantenya bernama Mee Thay. Tindakan eksploitasi seksual komersial yang dilakukan oleh Hendri kemudian dilaporkan di Polrestabes Tegalsari.¹⁴

Berkaitan dengan laporan yang SA ajukan di Polrestabes Tegalsari maka SA dipanggil ke Polrestabes Tegalsari untuk memberikan keterangan sebagai korban. Akan tetapi, selama proses persidangan belum ada keluarga yang mau mendampingi karena keluarga ibunya merasa keberatan menerima SA dan takut dengan pelaku.

Hal ini disebabkan karena korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya. Dengan

¹⁴Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil* (Surabaya: CV. Aswaja Pressindo, 2014), h. 231-236.

demikian korban hanya dianggap sebagai pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan. Meskipun, menderitanya korban secara fisik maupun mental akibat adanya keterlibatan korban di dalamnya.

Dalam kaitannya dengan penerapan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial pada anak maka upaya perlindungan hukum bagi korban harus lebih diperhatikan dengan tidak hanya menempatkan korban sebagai alat bukti untuk memberikan keterangan melainkan korban harus ditempatkan sebagai pencari keadilan dari tindakan yang telah dilakukan pelaku kejahatan kepada dirinya sehingga korban dapat memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki kelebihan dalam perlindungan anak dengan adanya pemberian restitusi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 71D ayat (1) sebagai perhatian negara terhadap penderitaan korban dari tindak eksploitasi seksual komersial anak, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memiliki kekurangan dengan tidak mencantumkan peraturan pemberian rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Sehingga korban seperti SA dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya yang selama ini telah dirampas oleh pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak. Selain itu, agar

korban dapat kembali beraktivitas di lingkungannya seperti semula serta melupakan kejadian yang menimpanya selama ini.

Untuk mengurangi keterlibatan anak perempuan dalam dunia eksploitasi seksual dan apalagi menghapusnya paling tidak harus diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Mengeliminasi kemungkinan terjadinya pemalsuan usia anak dengan cara memberikan identitas yang autentik dan steril dari kemungkinan untuk dimanipulasi. Misalnya, akta kelahiran merupakan salah satu instrument yang strategis dikembangkan untuk melacak usia yang sebenarnya dari seorang anak agar mereka tidak diberlakukan salah dengan melakukan operasi penertiban yang dilakukan petugas bekerjasama dengan LSM ke lokalisasi pelacuran.
2. Perlunya melakukan *counter-culture* terhadap berbagai praktik budaya yang merugikan anak-anak, khususnya anak-anak perempuan. Meski belakangan ini kesadaran tentang gender diakui telah makin meningkat tetapi kebiasaan masyarakat di pedesaan yang menganggap anak perempuan tidak harus melanjutkan sekolah tinggi atau mendorong anak perempuan untuk menikah di usia dini.
3. Kurangnya pengetahuan anak-anak perempuan mengenai reproduksi sehat khususnya soal cara dan bagaimana mereka harus menghargai tubuh miliknya sendiri dengan benar. Adanya kebiasaan sebagian anak melakukan hubungan seks pranikah dan kecenderungan anak-anak

perempuan mengenal kehidupan seks lebih dini sedikit banyak akan mendorong anak perempuan terjerumus ke dalam dunia pelacuran jika mereka kemudian dikecewakan pacar atau merasa telah kehilangan harga diri.

Dengan demikian upaya perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting karena masyarakat baik itu berupa kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual komersial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak dalam hukum Islam dianggap perbuatan zina *ghairu muhsan* karena adanya kesamaan pelanggaran kesusilaan atau kesopanan, perbuatan keji, serta perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi sehingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan dengan dikenakannya hukuman berat bagi siapa saja yang telah melakukan zina sebagaimana dalam QS al-Isra/17:32.
2. Pasal 66 dan Pasal 71D dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak. Akan tetapi, perlindungan hukum pihak korban tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya.

B. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa saran yang diajukan kepada berbagai pihak yaitu:

1. Ketika adanya niat untuk melakukan pemberantasan terhadap eksploitasi seksual komersial terhadap anak maka sangat diperlukan agar segala unsur terkait dan juga seluruh masyarakat untuk turut serta secara aktif melakukan kerjasama yang efektif untuk menyelamatkan anak yang merupakan masa depan bangsa dari tindakan eksploitasi seksual komersial anak.
2. Pihak penegak hukum harus menguatkan naluri keadilan mereka dengan menegakkan hukum semurni mungkin sehingga dapat memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku yang telah menjerumuskan anak ke dalam situasi darurat. Selain itu kepada Pemerintah harus dapat memberikan perlindungan optimal kepada anak-anak yang telah menjadi korban dengan memperbaiki mental, psikis, dan masa depan mereka agar anak yang menjadi korban dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Al-Bukhary, Al-Imam . *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid I, II, III, dan IV*. Jakarta: Klang Book Centre, 2009
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk DiHukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1997.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Hanafi, Ahmad . *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Hamzah. *Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Hudiono, Esthi Susanti. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*. Surabaya: CV. Aswaja Pressindo, 2014.
- Masyrofah, dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mulia, Musdah. *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*. Jakarta : Naufan Pustaka, 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

- Ningsih, Hamidah Ayu. "Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam". *Skripsi*. Bandung: Fak. Syariah Universitas Islam Bandung, 2004.
- Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Rahman, Abdul. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Rahman, Abdul. *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi Perspektif Hukum Nasional, Internasional, dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syaamil quran, 2012.
- Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ," dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002," dalam *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.
- Republik Indonesia . *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Republik Indonesia . *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Salam, Siku Abdul. *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Rabbani Press, 2012.
- Saraswati, Rika . *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sutedjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Suyanto, Bagong . *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Andi Rasniwati Rasyid lahir di Ujung Pandang pada tanggal 04 Desember 1994. Ayahnya bernama Andi Rasyid dan Ibunya bernama Hasni Hasan Saleh. Andi Rasniwati Rasyid merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan tumbuh di lingkungan terpelajar. Ayahnya merupakan guru sekolah menengah pertama di SMP Negeri 26 Makassar. Berdasarkan didikan kedua orang tuanyalah, Andi Rasniwati Rasyid memiliki minat akademik yang tinggi.

Andi Rasniwati Rasyid memulai pendidikannya di SD Inpres Mawang pada tahun 2000. Tamat SD pada tahun 2006, melanjutkan kesebuah SMP Negeri 26 Makassar yang terletak di Jl. Kompleks PU Mallengkeri Baru. Pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2012. Sesudah itu Andi Rasniwati Rasyid melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama menempuh pendidikan, minatnya terhadap dunia organisasi sangat tinggi dan memiliki prestasi akademik yang memuaskan. Andi Rasniwati Rasyid juga terdaftar sebagai anggota OSIS di SMP Negeri 26 Makassar. Kemudian saat masuk SMA, pernah menjadi pengurus ROHIS

Berbekal pengalaman inilah, beliau aktif pula di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus seperti Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan HPK (Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam) periode 2014-2015, anggota IPPS (Ikatan Penggiat

Peradilan Semu) Fakultas Syariah dan Hukum, dan anggota bidang keperempuan di PMII Cab. Gowa.

Bagi Andi Rasniwati Rasyid, dunia akademik dan non akademik saling menunjang satu sama lain. Prestasi akademik tanpa pengalaman organisasi juga tidak akan cukup menjadi bekal dalam persaingan kehidupan. Sebaliknya, organisasi tanpa prestasi akademik juga tidak mumpuni dalam persaingan dunia kerja. Oleh karena itu, prinsipnya adalah hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka anda akan tetap berada di tempat dan modal untuk melangkah maju adalah ilmu. Apapun profesinya, surge obsesinya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Ke-Kajin 1/Ag. 15/8

FORMAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI :

H a l : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Buat draft no 2 dan 3
sesuai RPK1 / 7/9-2015

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Rasniwati Rasyid

NIM : 10300112085

Semester/Klpk : VII / IV

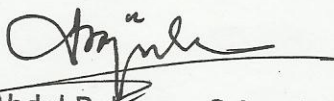
Angkatan : 2012

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

- X Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Di Polres Gowa).
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Anak ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) Ditinjau Dari Convention On The Right Of The Child (CRC) dan Hukum Islam.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb**

Mengetahui
Penasehat Akademik



(Abdul Rahman, S.Ag., M.Pd.)
NIP : 19731231 200501 1 034

Samata, 31 Agustus 2015

Pemohon,



(Andi Rasniwati Rasyid)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Sl. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 346 Tahun 2015

T E N T A N G
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2015

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Rektor Nomor 192 Tahun 2008 tentang Pedoman Edukasi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : a. Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag
2. Abdi Wijaya, S. Ag., M. Ag
- Sebagai pembimbing mahasiswa :
- Nama : Andi Rasniwati Rasyid
- NIM : 10300112085
- Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
- Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Ditinjau dari Convention on The Right of The Child (CRC) dan Hukum Islam
- b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2014;
- d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Samata
1 Desember 2015

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Samata, 1 Desember 2015

Nomor : SI.2/PP.00.9/1915 /2015
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi
An. Sdr (i). Andi Rasniwati Rasyid

Kepada YTH.

1. Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag (Pembimbing I)
2. Abdi Wijaya, S. Ag., M. Ag (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 8 Desember 2015
Waktu : 13.00 wita
Tempat : Ruang Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Lantai II
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Ditinjau dari *Convention on The Right of The Child* (CRC) dan Hukum Islam

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Ketua Jurusan,
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Dra. Nila Sastrawaty, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

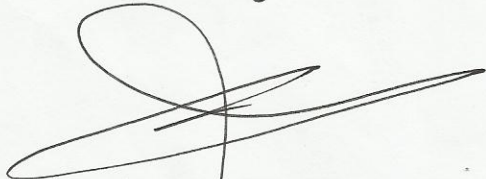
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ANDI RASNIWATI RASYID**
NIM: 10300112085 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,
setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan
dengan judul **"Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual
Komersial Anak (ESKA) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam"**. Memandang bahwa
skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan
ke sidang ujian hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

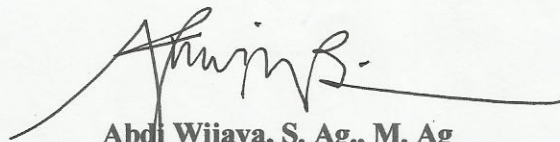
Samata, 18 Februari 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag
NIP. 19561231 198703 1 022

Pembimbing II



Abdi Wijaya, S. Ag., M. Ag
NIP. 19711005 200501 1 009

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 201 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Andi Rasniwati Rasyid
N I M : 10300112085
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Maret 2016
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak ESKA) Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Kurniati, M.Hi
Penguji I : Istiqamah, S.H, M.H
Penguji II : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Pelaksana : 1. Dra. Hj. Suharti, M.Pd
2. Drs. Baharuddin
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani : Samata
Pada tanggal : 1 Maret 2016

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

Nomor : SI.1/PP.00.9/1019/2016
Sifat : Penting
Lamp :
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 1 Maret 2016

Kepada

- Yth.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
2. Dr. Kurniati, M.Hi (Sekertaris)
3. Istiqamah, S.H, M.H. (Penguji I)
4. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (Penguji II)
5. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag (Pembimbing I)
6. Abdi Wijaya, S.S, M.Ag (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Andi Rasniwati Rasyid
NIM : 10300112085
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Maret 2016
Waktu : Pukul 13.00 Wita – selesai
Tempat : Ruang 104 (Ruang Dosen)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2016

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi H P K tanggal 1 Maret 2016 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**;
- Kedua** : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Ketiga** : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Keempat** : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
- Keenam** : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 1 Maret 2016
Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEK/ANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
01	02	03	04	05	06
1	Andi Rasniwati Rasyid 10300112085	Prof. Dr. Darussalam S. M.Ag	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag	Subehan Khalik, s.Ag, M.Ag	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Dra. Hj. Suharti, M.Pd Nurhayati wahid
2	Risnawati 10300111077	Prof. Dr. H. Usman, M.Ag	Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	Dr. Hazah Hasan, M.Hi	Dr. Hamsir, M.Hum Hj. Suriani, S.Sos, MM Nasirah Asri, S.Kom
3	Asriani azis 10300112079	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.A	Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SH Darmawati Samma, SE
4	Andi Putri Al- Maidah 10300111082	Proff. Dr. Ahmad. M. Sewang, M.A	Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag	Dr. Alimuddin, M.Ag	Dr. Hamsir, M.Hum Dra. Andi Masniah Nurjannah
5	Andi Khairun Hidayah 10300112038	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag	Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Dra. Hj. Suharti, M.Pd Musyfikah Ilayas, S.Hi, M.Hi
6	Husnah 10300111048	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	Zulfahmi, M.Ag, Ph. D	Dr. Hamsir, M.Hum	Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Hj. Suriani, S.Sos, MM Nurhayati wahid

Samata, 1 Maret 2016

Dekan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

19621016 199003 1003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER VIII (Delapan) WISUDA PERIODE April
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : Andi Rasniwati Rasyid

NIM : 10300112085

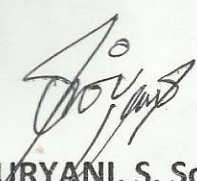
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang ~~Pelita~~ No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
3,5	4	4	11,5	3,83

Samata, 10 Maret 2016

Kasubag.
Akademik dan Kemahasiswaan


Hj. SURYANI, S. Sos., MM.
NIP : 19661019 199503 2 001

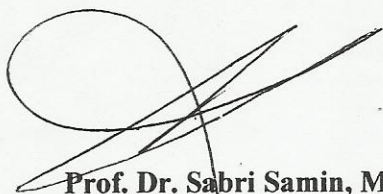
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ANDI RASNIWATI RASYID**
NIM: 10300112085 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan,
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,
setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan
dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual
Komersial Anak (ESKA) ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**. Memandang bahwa
skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan
ke sidang ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Samata, 15 Maret 2016

Pembimbing I



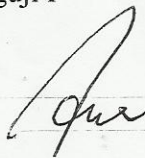
Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag
NIP. 19561231 198703 1 022

Pembimbing II



Abdi Wijaya, S. Ag., M. Ag
NIP. 19711005 200501 1 009

Penguji I



Istiqamah, SH., MH
NIP. 19680120 199503 2 001

Penguji II



Dr. H. Abd. Halim Talli, S. Ag, M. Ag
NIP. 19711020 199703 1 002

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 304 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI
TAHUN 2016

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Andi Rasniwati Rasyid
N I M : 10300112085
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2016
Prihal : Ujian Muanaqasyah/Skripsi
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Muanaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 192 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Muanaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalm Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si
Penguji I : Istiqamah, S.H, M.H
Penguji II : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Pelaksana : 1. Dra. Hj. Suharti, M.Pd
2. Drs. Baharuddin
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Muanaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata
: 17 Maret 2016

Nomor : SI.1/PP.00.9/ /2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 17 Maret 2016

Kepada

- Yth.* 1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua Majelis)
2. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Sekretaris)
3. Istiqamah, S.H, M.H (Penguji I)
4. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (Penguji II)
5. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag (Pembimbing I)
6. Abdi Wijaya, S.S, M.Ag (Pembimbing II)
7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Andi Ryasniwati Rasyid
N I M : 10300112085
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian
Munaqasyah/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2016
Buka Sidang : Pukul 08.30
Waktu : Pukul 09.00 Wita – selesai
Tempat : Ruangan Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003